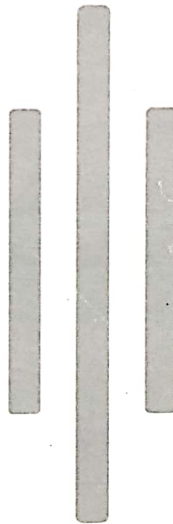




**ESA HILANG  
DUA TERBILANG**

# **LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ( LPPD )**



**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2018**



# LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. DASAR HUKUM .....	1
B. GAMBARAN UMUM DAERAH .....	2
1. Kondisi Geografis Daerah .....	2
a. Batas Administrasi Daerah .....	2
b. Luas Wilayah .....	2
c. Topografi .....	2
2. Gambaran Umum Demografis .....	3
a. Jumlah penduduk .....	3
b. Komposisi Penduduk Menurut Kepadatan Penduduk .....	4
3. Kondisi Perekonomian .....	4
C. GAMBARAN UMUM EKONOMI .....	4
a. Potensi Unggulan Daerah .....	4
b. Pertumbuhan Ekonomi .....	5
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH .....	7
A. VISI DAN MISI .....	7
1. Visi .....	7
2. Misi .....	8
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH .....	9
1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .....	10
2. Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan Misi Kedua .....	10
3. Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan Misi Ketiga .....	11
4. Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan Misi Keempat .....	11
C. PRIORITAS DAERAH .....	12
BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM .....	14
A. RINGKASAN URUSAN Konkuren .....	14
1. Urusan Wajib .....	15
2. Urusan Pilihan .....	19
3. Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .....	20
4. Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Umum .....	20
5. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA .....	22
B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN .....	23
C. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN .....	23
D. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) .....	24
1. Tataran Pengambilan Kebijakan .....	24
2. Tataran Pelaksana Kebijakan .....	25
3. Urusan Pemerintahan Umum .....	25
4. Tataran Pelaksanaan Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan .....	25
BAB IV REALISASI PELAKSANAAN PERENCANA KERJA PEMERINTAHAN (RKP) .....	26
A. HUBUNGAN ANTARA MISI RPJMD DENGAN RPJMN .....	26
B. HUBUNGAN ANTARA MISI RPJMD DENGAN NAWA CITA PRESIDEN JOKOWI .....	28
BAB V TUGAS PEMBANTUAN .....	29



# LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018

BAB VI	TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	30
A.	Kerjasama Antar Daerah dan	30
B.	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	31
C.	Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah	32
D.	Pembinaan Batas Wilayah	33
E.	Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	34
F.	Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	39
BAB VII	PENUTUP	40
LAMPIRAN	SUPLEMEN LPPD TAHUN 2017	
A.	INDIKATOR KINERJA KUNCI TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN	41
B.	INDIKATOR KINERJA KUNCI TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN	
C.	INDIKATOR KINERJA KUNCI TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	





## KATA PENGANTAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat 1 dan 2, menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kemudian dijabarkan juga melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 ini memberikan gambaran dan penjelasan atas seluruh realisasi dari rangkaian kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Kota Tebing Tinggi kurun waktu Tahun 2018, baik dalam hal capaian keberhasilan maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Masukan dan umpan balik tersebut merupakan input Pemerintah Daerah yang selanjutnya diolah menjadi tindakan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun berikutnya sehingga sebagai institusi publik yang *core bisnis-nya* adalah penyedia *public good and services* (barang dan jasa publik) mampu menyediakan barang dan jasa publik yang dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui LPPD dan Suplemen LPPD ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan manfaat bagi semua pihak atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 dalam rangka upaya